

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Bachar, D. (2003). *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*. Bogor: Kencana.
- Bahry, Z. (1995). *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik*. Bandung: Angkasa.
- Darwis, R., Elizamiharti, Kusumadewi, Y., Mohsi, Assulthoni, F., Hamid, A., . . . Purwoto, A. (2022). *Hukum Perdata*. (M. Sari, Ed.) Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Gunardi. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Murni, Ed.) Jakarta Selatan: Damera Press.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2009). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Ed. 2)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M., Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Harahap, Z. (1997). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irwansyah. (2023). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (A. Yunus, Ed.) Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Makara, M. T. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mappong, H. Z. (2010). *Eksekusi putusan serta merta (proses gugatan dan cara membuat putusan serta pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata)*. Tunggul Mandiri Publishing.

- Mertokusumo, S. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad. A. (2000). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., et al. (2006). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta: Kencana.
- Prodjodikoro, W. (1984). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- R. Subekti., & R. Tjitrosudibio. (2006). *Kitab undang-undang hukum perdata (Cet. ke-37)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ratna Artha Windari. (2014). *Hukum perjanjian*. Yogyakarta.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Acara Perdata*. (S. H. Nata, Ed.) Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Samosir, D. (2011). *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Satrio, J. (2023). *Hukum perikatan: Perjanjian pada umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Situmorang, V. M., & Sitanggang, C. (1993). *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeroso, R. (1994). *Praktek hukum acara perdata: Tata cara dan proses persidangan*. Sinar Grafika.
- Subekti. (1975). *Aneka perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta:Intermasa.

- Swantoro, H. (2018). *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simpang Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*. Jakarta Timur: RAYYANA KOMUNIKASINDO.
- Syahrani, R. (1988). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., & Syahril, M. A. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: GET PRESS INDONESIA.
- Usman, R. (2024). *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah Hak Tanggungan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Wijaya, I.G. Rai. (2004). *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Edisi Revisi Teori & Praktik*. Bekasi: Kesaint Blanc.
- Wiraguna, S. A., & Harahap, P. (2026). *Hukum acara perdata: Teori dan praktik*. Purwokerto: Revormasi.

b. Jurnal

- Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919>.
- Peturun, P. E. N. T. A. (2021). Upaya Hukum Pasca Putusan Perkara Wanprestasi Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Jaminan Secara Sukarela. *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 104-113. <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v2i2.1463>.
- Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 248-258. <https://doi.org/10.47007/lj.v12i3.1225>
- Siboro, R. H., & Nababan, R. (2025). Peran Pengadilan Tinggi Dalam Menjamin Keadilan di Tingkat Banding. *Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(1), 96-110.
- Slamet, S. R., & Olivia, F. (2023). Dwangsom sebagai upaya paksa putusan hakim. *Lex Jurnalica*, 20(2). <https://doi.org/10.47007/lj.v20i2.6746>.
- Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 841-848. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>.

Wantu, F. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>.

WN, S. F., Hayatinnufus, M. A., Listyani, N. C., & Suyatna, R. G. (2025). Asas-Asas Utama dalam Perjanjian : Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 293-297. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.482>.

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Herzien Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227).

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52).

d. Skripsi

Nisa, A. A. (2021). Proses penyelesaian perkara wanprestasi atas sengketa balik nama dalam jual beli tanah (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

e. Lain-Lain

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. “*Berita Detail*”, <https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog>, diakses pada 10 April 2026.

Abdul Manan. (2011). Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata, makalah pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, Hotel Mercuri Ancol, 18-22 September 2011.